

Suami...

(Sambungan hlm 1)

"Sidang mengusulkan sebagai ketua umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020 adalah Dr H Haedar Nashir," kata ketua panitia pemilihan Dahlan Rais di Balai Sidang Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh), Makassar, Kamis (6/8). "Apakah bisa diterima hadirin sekalian?" tanya Dahlan.

"Bisa..!!!" jawab ribuan peserta. Tok! Ketua umum PP Muhammadiyah periode ke depan pun ditetapkan.

Selanjutnya, sidang juga menetapkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

"Alhamduillah sidang 13 anggota PP berjalan tertib, lancar, sehingga hanya memerlukan waktu 10 menit. Sidang tersebut menghasilkan ketua umum dan sekretaris umum," lanjut Dahlan Rais.

Sementara dalam Muktamar Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini kembali terpilih menjadi ketua umum. Anggota Humas Muktamar Aisyiyah, Hajar NR mengatakan, Noordjannah kembali terpilih setelah 13 formatur yang terpilih melakukan konsolidasi. "Iya, Bu Nur kembali terpilih. Ini jadi periode kedua beliau," singkat Hajar, Kamis (6/8) malam.

Haedar memperoleh 1.947 suara, sedangkan istrinya Noordjannah meraih 1.480 suara.

Dalam jumpa persnya, Haedar Nashir mengatakan, terpilihnya ketum secara cepat karena sistem pemilihan sudah terstruktur dengan baik. Sehingga yang muncul dalam pemilihan adalah kebersamaan. Sebelumnya, dalam pemilihan ketum PP Muhammadiyah hanya berlangsung 10 menit.

"Terima kasih pada Din yang telah memimpin Muhammadiyah dengan cemerlang. Pak Din telah melakukan hal-hal strategis seperti jihad kebangsaan dan jihad konstitusi. Terimakasih juga tentu saya sampaikan kepada Bapak Amien Rais sebagai Bapak Reformasi, dan Buya Safii Maarif sebagai Bapak Bangsa," kata Haedar memulai penjelasan.

Haedar yakin Muhammadiyah ke depan akan semakin berkembang. Dalam lima tahun kedepan sudah disiapkan program-program yang akan dijalankan kepengurusan PP Muhammadiyah periode 2015-2020.

"Menjadikan Muhammadiyah makin produktif dalam kehidupan umat dan universal," katanya.

Sementara, Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai jabatan atau kepemimpinan

di Muhammadiyah bukan sesuatu yang diperebutkan. Jabatan, merupakan suatu amanah. "Kami tidak membawa visi-misi masing-masing. Tetapi, visi-misi pimpinan Muhammadiyah adalah melaksanakan hasil Muktamar sehingga jabatan atau kepemimpinan di Muhammadiyah merupakan amanah untuk melaksanakan hasil Muktamar."

Mendunia

Sementara kaum muda Muhammadiyah menanggapi positif keunikan terpilihnya dua kandidat ketua umum PP Muhammadiyah dan Aisyiyah yang merupakan suami istri. "Berdasarkan fatsun politik mereka berdua akan berduet menjadi ketua umum, sebuah peristiwa unik setelah 100 tahun lalu juga dipimpin pasangan suami istri Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Ahmad Dahlan," ujar koordinator Kaukus Muda Muhammadiyah, Bachtiar Kurniawan, kemarin.

Ia menegaskan hasil pemilihan pimpinan pusat dua organisasi tersebut sudah berjalan damai. "Berdasarkan tradisi, yang memperoleh suara terbanyak sudah selayaknya menjadi ketua umum. Moral politik itu harus dijaga sebaik-baiknya. Tradisi itu sudah berlangsung sejak muktamar 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 dan 2010. Sudah seharusnya kita hargai," tandas Bachtiar.

Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq mengatakan, sesuai konvensi yang berlaku di Muhammadiyah, Haedar Nashir yang mendapat suara terbanyak dalam pemilihan memang mendapat kesempatan pertama untuk menyatakan siap atau tidak menerima amanah ketua umum.

"Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menjadi ketua umum Muhammadiyah pertama yang berasal dari Jawa Barat," papar Fajar Riza.

Keberadaan tokoh-tokoh baru dalam jajaran kepengurusan seperti Busyro Muqoddas (mantan Komisioner KPK), Hajriyanto Tohari (mantan Waka MPR), Muhadjir Effendy (Rektor Universitas Muhammadiyah Malang), Suyatno (Rektor Universitas Uhamka) menambah kekuatan gerak organisasi.

Nama-nama lain yang kembali terpilih adalah Yunahar Ilyas, Dahlan Rais, Dadang Kahmad, Anwar Abbas, Syafiq Mufghni, dan Agung Danarto, dan Good Will.

"Kepengurusan PP Muhammadiyah Periode 2015-2020 ini harus segera melakukan langkah-langkah strategis menata kelembagaan, diantaranya pembenahan kesekretariatan dan manajemen komunikasi publik yang selama ini kurang diperhatikan," kata Fajar Riza. (bn, G14-90)